BAB II

KERANGKA TEORI

A. Budaya Politik

Budaya politik sebagai kondisi-kondisi yang dapat mewarnai corak kehidupan dalam bermasyarakat, dan merupakan bagian dari kehidupan berpolitik, di mana dari budaya politik itu menjadi sebuah fenomena dalam masyarakat yang memiliki pengaruh terhadap struktur dan sistem dalam dunia perpolitikan itu sendiri.

Rusadi Sumintapura menyatakan bahwa budaya politik tidak lain adalah pola tingkah laku individu itu sendiri dan orientasinya terhadap kehidupan politik yang dihayati oleh anggota suatu sistem politik itu sendiri. Dengan pengertian budaya politik tersebut, pemahaman konsep yang lebih lanjut terletak pada dua tingkat orientasi politik, yaitu sistem dan individu. ¹

Alan R. Ball juga menyatakan bahwa budaya politik adalah suatu susunan yang terdiri dari sikap, kepercayaan, emosi dan nilai-nilai masyarakat yang berhubungan dengan sistem politik dan isu-isu politik. Budaya politik merupakan aspek politik dari nilai-nilai yang terdiri atas pengetahuan, adatistiadat, tahayyul, dan mitos. Kesemuanya dikenal dan diakui oleh sebagian besar masyarakat. Budaya politik tersebut memberikan rasional untuk menolak atau menerima nilai-nilai dan norma lain.²

¹ Grabiel A. Almond dan Sidney Verba, *Budaya Politik, Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara* (terj. Sahat Simamora), (Bumi Aksara, 1990), 13.

Ardi Al-Maqasary, Pengertian Budaya Politik, http://www.e-jurnal.com/2013/11/pengertian-budaya-politik.html?m=1 (Ahad, 2 April 2017, 13:25)

Hakekat kebudayaan politik suatu masyarakat terdiri dari sistem kepercayaan yang sifatnya empiris, simbol-simbol yang ekspresif dan sejumlah nilai yang membatasi tindakan politik, maka jika ingin mendapatkan gambaran dan ciri politik suatu bangsa secara bulat dan utuh, maka kita pun dituntut untuk melakukan penelahan terhadap sisinya yang lain.

Berkaitan dengan sistem politik, kebudayaan politik masyarakat dipengaruhi oleh sejarah perkembangan sistem, disamping itu kebudayaan politik lebih mengutamakan dimensi psikologi suatu sistem, seperti sikap, sistem kepercayaan atau simbol-simbol yang dimiliki dan diterapkan oleh individu-individu dalam masyarakat sekaligus harapan-harapannya.

Albert Wijaya dalam desertasinya, menggunakan konsep budaya tidak jauh berbeda dengan konsep ideologi termasuk di dalamnya sistem kepercayaan dan nilai-nilai merupakan bagian dari budaya politik yang biasanya menyangkut masalah nilai dan pandangan politik yang hampir selalu berkaitan dengan peraturan dan pertarungan kekuasaan. Lebih jauh Albert menyatakan bahwa budaya politik adalah aspek-aspek politik dari sistem-sistem nilai yang terdiri dari: ide-ide, pengetahuan, adat-istiadat, tahayul dan mitos. Kesemuanya dikenal dan diakui oleh sebagian besar masyarakat. Budaya politik tersebut member rasional untuk menolak atau menerima nilai-nilai dan norma lain.³

Salah satu aspek penting dalam sistem politik adalah budaya politik (political culture) yang mencerminkan faktor subjektif. Budaya politik adalah

٠

³ Albert Wijaya, *Budaya Politik dan Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta: LP3ES, 1982), 3.

budaya dari keseluruhan dari pandangan politik, seperti norma-norma, polapola orientasi terhadap, politik dan pandangan hidup pada umumnya. Budaya politik mengutamakan dari psikologis dari suatu sistem politik, yaitu sikapsikap, sistem-sistem kepercayaan, simbol-simbol yang dimiliki oleh individuindividu dan beroperasi diseluruh masyarakat, serta harapan harapannya. Kegiatan politik misalnya, tidak hanya ditentukan oleh tujuan-tujuan yang didambakannya, akan tetapi juga oleh harapan harapan politik yang dimilikinya dan oleh pandangan mengenai situasi politiknya.

Bentuk budaya politik dari masyarakat dipengaruhi oleh sejarah perkembangan dari sistem olah agama yang terdapat dalam masyarakat itu, kesukuan status sosial, konsep mengenai kekuasaan, kepemimpinan dan sebagainya.

Umumnya dianggap bahwa dalam sistem politik terdapat 4 variabel:

- Kekuasaan sebagai cara untuk mencapai hal yang diinginkan antara lain dengan membagi sumber-sumber diantara kelompok-kelompok yang ada didalam masyarakat itu sendiri.
- 2. Kepentingan tujuan-tujuan yang dikejar oleh pelaku atau kelompok politik.
- 3. Kebijakan hasil dari interaksi antara kekuasaan dan kepentingan, biasanya dalam bentuk perundang-undangan.
- 4. Budaya politik orientasi subjek dari individu terhadap sistem politik.⁴

Geertz dalam *The Interpretation of Culture* menunjukkan bahwa meskipun istilah "budaya" cenderung memiliki arti yang cukup luas namun

.

⁴ Miriam budiardjo, *Dasar- Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), 49.

kunci dari setiap kebudayaan adalah ide tentang "makna" atau "signifikasi". Geertz melihat kebudayaan tidak hanya mendasarkan pada kode-kode simbolik yang berdiri sendiri, melainkan kebudayaan melalui perilaku atau tindakan sosial itulah simbol-simbol tersebut saling berkaitan dan memiliki artikulasi. Dalam hal ini konsep-konsep abstrak dari tindakan seperti "ritual ", " identitas " dan " struktur " dapat di terjemahkan signifikasi serta fungsinya.

Geertz telah lama mengkaji tentang aspek spiritualitas masyarakat jawa. Dalam tulisannya yang berjudul *The Religion of Java* (1960). Geertz menterjemahkan agama sebagai fakta budaya, bukan hanya sebagai ekspresi kebutuhan sosial. Geertz melihat secara mendalam pengaruh agama dalam kehidupan masyarakat jawa melalui simbol, ide, ritual, dan kebiasaan. Dalam tulisan tersebut Geertz menggambarkan dimensi budaya dari agama. Geertz menggambarkan kebudayaan sebagai susunan arti atau ide, yang dibawa simbol, tempat seseorang meneruskan pengetahuan mereka tentang kehidupan dan mengekspresikan sikap mereka terhadapnya.⁵

B. Teori Fungsionalisme Bronislaw Malinowski

Teori fungsionalisme dalam ilmu antropologi mulai dikembangkan oleh seorang pakar yang sangat penting dalam sejarah teori antropologi, yaitu Bronislaw Malinowski. Kemudian ia mengembangkan suatu kerangka teori baru untuk menganalisis fungsi kebudayaan manusia, yang disebutnya dengan

⁵ Geertz, Clifford. Dalam Shajat Theoris of Religion. Agama Sebagai Sistem Budaya, (Jakart, 1996), 406.

teori fungsionalisme kebudayaan atau *functional theory of culture*. ⁶ Bagi Malinowski mengajukan sebuah orientasi teori yang dinamakan fungsionalisme, yang beranggapan atau berasumsi:

" bahwa semua unsur kebudayaan bermanfaat bagi masyarakat di mana unsur itu terdapat. Dengan kata lain, pandangan fungsionalisme terhadap kebudayaan mempertahankan bahwa setiap pola kelakuan yang sudah menjadi kebiasaan, setiap kepercayaan dan sikap yang merupakan bagian dari kebudayaan dalam suatu masyarakat, memenuhi beberapa fungsi mendasar dalam kebudayaan yang bersangkutan."

Menurut pandangan Malinowski dari satu unsur budaya adalah kemampuannya untuk memenuhi beberapa kebutuhan dasar atau beberapa kebutuhan yang timbul dari kebutuhan dasar yaitu kebutuhan sekunder dari warga suatu masyarakat. Kemampuan analitik diperlukan agar dapat memahami latar dan fungsi dari aspek yang diteliti, adat dan pranata sosial dalam masyarakat. Menurut Malinowski konsep yang dirumuskan kedalam tingkatan abstraksi mengenai fungsi aspek kebudayaan, yakni:

- Saling keterkaitannya secara otomatis, pengaruh dan efeknya terhadap aspek lainnya.
- 2. Konsep oleh masyarakat yang bersangkutan
- Unsur-unsur dalam kehidupan sosial masyarakat yang terintegrasi secara fungsional.
- 4. Esensi atau inti dari kegiatan/ aktifitas tersebut tak lain adalah berfungsi untuk pemenuhan kebutuhan dasar "biologis" manusia.

٠

⁶ Koentjaraningrat, *Sejarah Antropologi I*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1980), 162.

Melalui tingkatan abstraksi tersebut Malinowski kemudian mempertegas inti dari teorinya dengan mengasumsikan bahwa segala kegiatan/aktifitas manusia dalam unsur-unsur kebudayaan itu sebenarnya bermaksud memuaskan suatu rangkaian dari sejumlah kebutuhan naluri makhluk manusia yang berhubungan dengan seluruh kehidupannya. Kelompok sosial atau organisasi sebagai contoh, awalnya merupakan kebutuhan manusia yang suka berkumpul dan berinteraksi, perilkau ini berkembang dalam bentuk yang lebih solid dalam artian perkumpulan tersebut dilembagakan melalui rekayasa manusia.⁷

Dalam konsep fungsionalisme Malinowski dijelaskan beberapa unsur kebutuhan pokok manusia yang terlembagakan dalam kebudayaan dan berfungsi untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan manusia. Seperti kebutuhan gizi (nutrition), berkembang biak (reproduction), kenyamanan (body comforts), keamanan (safety), rekreasi (relaxation), pergerakan (movement), dan pertumbuhan (growth). Setiap lembaga sosial (Institution, dalam istilah Malinowski) memiliki bagian-bagian yang harus dipenuhi dalam kebudayaan.

Inti dari teori Malinowski menjelaskan bahwa segala aktifitas kebudayaan itu sebenarnya memuaskan suatu rangkaian kebutuhan naluri makhluk manusia yang berhubungan dengan kehidupannya. Kebutuhan itu meliputi kebutuhan primer/ biologis maupun kebutuhan sekunder/ psikologis, kebutuhan mendasar yang muncul dari kebudayaan itu sendiri.

⁷ Kaplan, David, *Teori Budaya*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar), 2002, 15.

Teori Malinowski menegaskan definisi budaya sebagai hasil cipta, karya dan karsa manusia. Kebudayaan mempunyai nilai pragmatis sebelum manusia mencipta, yang terlebih dahulu ada adalah tujuan dari penciptaan itu sendiri. Pandangan fungsional atas kebudayaan menekankan bahwa setiap pola tingkah laku, setiap kepercayaan dan sikap yang merupakan bagian dari kebudayaan suatu masyarakat, memerankan fungsi dasar di dalam kebudayaan yang bersangkutan.

Malinowski berpendapat bahwa pada dasarnya kebutuhan manusia sama, baik itu kebutuhan yang bersifat biologis maupun yang bersifat psikologis dan kebudayaan pada pokoknya memenuhi kebutuhan tersebut. Menurut pendapatnya ada tiga tingkatan yang harus terekayasa dalam kebudayaan, yakni:

- Kebudayaan harus memenuhi kebutuhan biologis, seperti kebutuhan akan pangan dan prokreasi
- 2. Kebudayaan harus memenuhi kebutuhan instrumental, seperti kebutuhan akan hukum dan pendidikan
- 3. Kebudayaan harus memenuhi kebutuhan integratif, seperti agama dan kesenian.8

Setelah mengetahui antara teori fungsional dengan realita budaya politik masyarakat di Desa Abar-Abir, maka dalam skripsi ini penulis akan membahas mengenai teori fungsionalisme dan keterkaitannya dengan kebudayaan masyarakat Desa Abar-Abir dalam proses pemilihan kepala desa.

⁸ http://www.acedemia.edu/9433821/Teori Fungsionalisme Kebudayaan (Senin, 3 April 2017, 20:17)

C. Fenomenologi

Kata "fenomena", dalam bahasa Inggris, "phenomenon" bentuk pluralnya "phenomena" dari kata Yunani "phainomenon" dari kata "phainesthai" yang berarti menunjukkan, atau "phainein" yang berarti menampakkan diri; dalam kata Inggris. Secara istilah, fenomena merujuk kepada teori yang menyatakan bahwa pengetahuan itu terbatas pada fenomena fisik dan fenomena mental. Fenomena fisik merupakan obyek persepsi sedangkan fenomena mental menjadi obyek intropeksi.

Pengertian yang hampir sama dengan runes yang ditemukan dalam kamus "Dictionary Of Philosophy" susunan Peter A. Angeles, fenomena adalah obyek persepsi atau obyek yang bisa dipahami; fenomena adalah obyek dari sense experince, yakni obyek pengalaman indera, fenomena adalah sesuatu yang hadir kedalam kesadaran, fenomena adalah setiap fakta atau kejadian yang dapat diobservasi.⁹

Dalam bahasa indonesia biasa dipakai istilah *gejala*. Secara istilah, fenomenologi adalah ilmu pengetahuan (*logos*) tentang apa yang tampak. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa fenomenologi adalah suatu aliran yang membicarakan fenomena atau segala sesuatu yang tampak atau yang menampakkan diri. ¹⁰

.

⁹ Afandi, Abdullah Khozin, Fenomenologi: Pemikiran-pemikiran Hussler (Surabaya: elkaf, 2007),

<sup>5.
&</sup>lt;sup>10</sup> K. Bertens, *Filsafat Barat Abad XX: Inggris-Jerman* (Jakarta: Gramedia, 1981), 109.

Menurut Husserl, fenomenologi adalah pengalaman subyek atau pengalaman fenomenologikal; atau suatu studi tentang kesadaran dari prespektif pokok dari seseorang. fenomenologi menyelidiki pengalaman kesadaran yang berhubungan dengan pertanyaan, seperti bagaimana pembagian antara subjek dan objek muncul dan bagaimana suatu hal didunia ini diklasifikasikan. Para fenomenolog juga berasumsi bahwa kesadaran bukan dibentuk karena kebetulan dan dibentuk oleh sesuatu yang lainnya dirinya sendiri. Ada tiga yang memengaruhi pandangan fenomenologi, yaitu Edmund Husserl, Alfred Schultz, dan Weber. Weber memberi tekanan *verstehen*, yaitu pengertian dari interpretatif terhadap pemahaman manusia.

Filsuf Edmund Husserl yang dikenal sebagai *founding father* fenomenologi mengembangkan ide tentang dunia kehidupan *(lifeworld)*. Ia menggunakan filsafat fenomenologi untuk mengetahui bagaimana sebenarnya struktur pengalaman yang merupakan cara manusia mengorganisasi relitasnya sehingga menjadi terintegrasi dan autentik. Bagi Husserl, dunia kehidupan menyediakan dasar-dasar harmoni kultural dan aturan-aturan yang menentukan kepercayaan-kepercayaan yang diterima apa adanya *(taken forgranted)* dalam sebuah tata kelakuan sistematik.¹¹

Fenomena dapat dipandang dari dua sudut. Pertama,fenomena selalu "menunjuk ke luar" atau berhubungan dengan realitas di luar pikiran. Kedua,fenomena dari sudut kesadaran kita, karena fenomenologi selalu berada dalam kesadaran kita. Oleh karena itu dalam memandang fenomena harus

-

¹¹ Sindung Haryanto, *Spektrum Teori Sosial: Dari Klasik hingga Postmodern* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Meia, 2012), 129.

terlebih dahulu melihat "penyaringan" (*ratio*), sehingga mendapatkan kesadaran yang murni. Donny menuliskan fenomenologi adalah ilmu tentang esensi-esensi kesadaran dan esensi ideal dari obyek-obyek sebagai korelasi dengan kesadaran. Fenomenologi juga merupakan sebuah pendekatan filosofis untuk menyelidiki pengalaman manusia. Fenomenologi bermakna metode pemikiran untuk memperoleh ilmu pengetahuan baru atau mengembangkan pengetahuan yang ada dengan langkah-langkah logis, sistematis kritis, tidak berdasarkan apriori/prasangka, dan tidak dogmatis.¹²

Tugas utama fenomenologi menurut Husserl menjalin keterkaitan manusia dengan realitas. Bagi Husserl, realitas bukan sesuatu yang berbeda pada dirinya lepas dari manusia yang mengamati. Realitas itu mewujudkan diri atau menurut ungkapan Martin Heideger juga seorang fenomenolog: "sifat realitas itu membutuhkan keberadaan manusia". Noumena membutuhkan tempat tinggal (unterkunft) ruang untuk berada, ruang itu adalah manusia.

Husserl menggunakan istilah fenomenologi untuk menunjukkan apa yang nampak dalam kesadaran kita dengan membiarkannya termanifestasi apa adanya tanpa memasukkan kategori pikiran kita padanya atau menurut ungkapan Husserl: *zuruck den sachen selbt* (kembalilah pada realitas itu sendiri). Berbeda dengan Kant, Husserl menyatakan, bahwa apa yang disebut fenomena adalah realitas itu sendiri yang nampak setelah kesadaran kita cair dengan realitas. Fenomenologi Husserl justru bertujuan mencari yang esensial atau *eidos* (esensi) dari apa yang disebut fenomena. Metode yang digunakan

¹² Denny Moeryadi, "Pemikiran Fenomenologi menurut Edmund Husserl", *Journal Sosiologi*, Vol. 3 No. 7 (Desember, 2009), 150.

untuk mencari yang esensial adalah dengan membiarkan fenomena itu berbicara sendiri tanpa dibarengi dengan prasangka (presuppositionlessness). 13

Fenomenologi berusaha mengungkap fenomena sebagaimana adanya (to show it self) atau menurut penampakannya sendiri (veils it self), atau menurut penjelasan Elliston, "phenomenology then means... to let what shows itself be seen by itself and in terms of itself, just as it shows itself by and from itself." Fenomenologi dapat berarti: membiarkan apa yang menunjukkan dirinya sendiri dilihat melalui dirinya sendiri dan dalam batas-batas dirinya sendiri, sebagaimana ia menunjukkan dirinya sendiri melalui dan dari dirinya sendiri. Untuk ini Husserl menggunakan istilah "intensionalitas", yakni realitas yang menampakkan diri dalam kesadaran individu atau kesadaran intensional dalam menangkap 'fenomena apa adanya'.

Menurut G. Vander leeuw, fenomenologi mencari atau mengamati fenomena sebagaimana yang tampak. Dalam hal ini ada tiga prinsip yang tercakup di dalamnya: (1) sesuatu itu berwujud, (2) sesuatu itu tampak, (3) karena sesuatu itu tampak dengan tepat maka ia merupakan fenomena. Penampakan itu menunjukkan kesamaan antara yang tampak dengan yang diterima oleh si pengamat, tanpa melakukan modifikasi. ¹⁴

Fenomenologi juga mengadakan refleksi mengenai pengalaman langsung atau refleksi terhadap gejala/fenomena. Dengan refleksi ini akan mendapatkan pengertian yang benar dan sedalam-dalamnya. Dalam fenomenologi hendak melihat apa yang dialami oleh manusia dari sudut

¹³ *Ibid.*, 8.

¹⁴ Muhammad Hakim, "Teori Fenomenologi menurut Edmund Husserl", *Journal of Indonesian*, (November, 2014), 161.

pandang orang pertama, yakni dari orang yang mengalaminya. Fokus fenomenologi bukan pengalaman partikular, melainkan struktur dari pengalaman kesadaran, yakni realitas obyektif yang mewujud di dalam pengalaman subyektif orang per orang. Fenomenologi berfokus pada makna subyektif dari realitas obyektif di dalam kesadaran orang yang menjalani aktivitas kehidupannya sehari-hari.

Teori Fenomenologi dari Alfred Schutz mengemukakan bahwa orang secara aktif menginterpretasikan pengalamannya dengan memberi tanda dan arti tentang apa yang mereka lihat. Interpretasi merupakan proses aktif dalam menandai dan mengartikan tentang sesuatu yang diamati, seperti bacaan, tindakan atau situasi bahkan pengalaman apapun. Lebih lanjut, Schutz menjelaskan pengalaman indrawi sebenarnya tidak punya arti. Semua itu hanya ada begitu saja; obyek-obyeklah yang bermakna. Semua itu memiliki kegunaan-kegunaan, nama-nama, bagian-bagian, yang berbeda-beda dan individu-individu itu memberi tanda tertentu mengenai sesuatu.

Menurut Schutz, fenomenologi adalah studi tentang pengetahuan yang datang dari kesadaran atau cara kita memahami sebuah obyek atau peristiwa melalui pengalaman sadar tentang obyek atau peristiwa tersebut. Sebuah fenomena adalah penampilan sebuah obyek, peristiwa atau kondisi dalam persepsi seseorang, jadi bersifat subjektif. Bagi Schutz dan pemahaman kaum fenomenologis, tugas utama analisis fenomenologis adalah merekonstruksi dunia kehidupan manusia "sebenarnya" dalam bentuk yang mereka sendiri alami. Realitas dunia tersebut bersifat intersubjektif dalam arti bahwa sebagai

anggota masyarakat berbagi persepsi dasar mengenai dunia yang mereka internalisasikan melalui sosialisasi dan memungkinkan mereka melakukan interaksi atau komunikasi.¹⁵

Schutz membedakan antara makna dan motif. Makna berkaitan dengan bagaimana aktor menentukan aspek apa yang penting dari kehidupan sosialnya. Sementara, motif menunjuk pada alasan seseorang melakukan sesuatu. Makna mempunyai dua macam tipe, yakni makna subjektif dan makna objektif. Makna subjektif merupakan konstruksi realitas tempat seseorang mendefinisikan komponen realitas tertentu yang bermakna baginya. Makna objektif adalah seperangkat makna yang ada dan hidup dalam kerangka budaya secara keseluruhan yang dipahami bersama lebih dari sekadar idiosinkratik.

Schutz juga membedakan dua tipe motif, yakni motif "dalam kerangka untuk" (*in order to*) dan motif "karena" (*because*). Motif pertama berkaitan dengan alasan seseorang melakukan sesuatu tindakan sebagai usahanya menciptakan situasi dan kondisi yang diharapkan di masa datang. Motif kedua merupakan pandangan retrospektif terhadap faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan tertentu.¹⁶

Teori fenomenologi, scutz memperkenalkan dua istilah motif. Motif yang pertama adalah motif "sebab" (*because of motive*). Kemudian motif yang kedua adalah motif "tujuan" (*in order to motive*). Motif "sebab" adalah yang melatarbelakangi seseorang melakukan tindakan tertentu. Sedangkan motif

¹⁵ Sindung Haryanto, *Spektrum Teori Sosial*. (Jogjakarta: Ar-Ruz Media, 2012), 149.

¹⁶ Sujatmiko dan Sugeng Harianto, "Studi Fenomenologi Perilaku Penumpang di atas Gerbong Kereta Api", *Journal Ilmu Sosiologi*, Vol 02 No. 01 (Januari, 2014), 3-5.

"tujuan" adalah tujuan yang ingin dicapai oleh seseorang yang melakukan suatu tindakan tertentu.

D. Pemilihan Kepala Desa

1. Pengertian Desa dan Kepala Desa

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2014 tentang Desa tertuang dalam BAB I Ketentuan Umum, Pasal I No 1 bahwasannya,

Desa adalah Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. ¹⁷

Desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul, adat istiadat dan nilainilai sosial budaya masyarakat dan melaksanakan bagian bagian dari suatu urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh pemerintah kabupaten atau kota. Jadi untuk keperluan pengurusan masyarakat tersebut tentunya dibutuhkan seorang pemimpin yang mampu memimpin jalannya pemerintahan desa.

Kepala Desa merupakan unsur terpenting yang harus ada dalam suatu sistem Pemerintahan Desa selain dari pada BPD. Kepala Desa merupakan pimpinan tertinggi dalam suatu desa yang dipilih langsung oleh masyarakat desa. kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Kepala Desa adalah

-

 $^{^{\}rm 17}$ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia No.6 Tahun 2014.

unsur penyelenggara pemerintahan desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa sebagai Pemimpin Pemerintahan Desa. 18

Menurut Unang Sunardjo kepala desa adalah penyelenggara dan penanggung jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan ketertiban. Disamping itu kepala desa juga mengemban tugas membangun mental masyarakat baik dalam bentuk menumbuhkan maupun mengembangkan semangat membangun yang dijiwai oleh asas usaha bersama dan kekeluargaan.

Sedangkan menurut Ramlan Surbakti kepala desa adalah penguasa tunggal dalam pemerintahan desa dalam melaksanakan dan menyelenggarakan urusan rumah tangga desa dan disamping itu ia menyelenggarakan urusan-urusan pemerintah, meskipun demikian didalam melaksanakan tugasnya ia mempunyai batas-batas tertentu dan tidak dapat menuruti keinginannya sendiri.²⁰

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kepala desa adalah orang yang bergerak lebih awal, memelopori, mengarahkan, membimbing, menuntun, dan menggerakkan masyarakatnya melalui pengaruhnya dan sekaligus melakukan pengawasan tehadap tingkah laku masyarakat desa yang dipimpinnya.

²⁰ Ramlan Surbakti, *Memahami Imu Politik*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2005), 81.

٠

¹⁸ Nasroen, Daerah Otonomi Tingkat Terbawah, (Jakarta: Beringin Trading Company, 1995), 41.

¹⁹ Unang Sunardjo, *Pemerintahan Desa dan Kelurahan*, (Bandung: Tarsito, 2004), 197.

2. Tata cara Pemilihan Kepala Desa

Pemilihan kepala desa dilaksanakan oleh panitia pemilihan, biaya pemilihan kepala desa dibebankan kepada APB Desa yang bersumber pada APBD kabupaten/kota. Pemilihan kepala desa dilakukan melalui tahapan penjaringan dan penyaringan bakal calon, penetapan calon, kampanye, pemungutan suara, dan penetapan calon terpilih. Calon kepala desa terpilih ditetapkan berdasarkan perolehan suara terbanyak. Calon kepala desa terpilih tersebut diatas kemudian diajukan oleh ketua panitia pemilihan kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lama tujuh hari setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih, kemudian Badan Permusyawaratan Desa paling lama tujuh hari setelah menerima laporan panitia pemilihan menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati/Walikota.

Bupati/Walikota menerbitkan keputusan Bupati/Walikota tentang pengesahan calon kepala desa terpilih paling lama tiga puluh hari kerja terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota. Kepala desa terpilih dilantik oleh bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 hari kerja terhitung tanggal penerbitan keputusan bupati/walikota.²¹

Pemilihan Kepala Desa atau seringkali disingkat Pilkades, adalah suatu pemilihan kepala desa secara langsung oleh warga desa setempat. Berbeda dengan lurah yang merupakan warga sipil, kepala desa merupakan jabatan yang dapat diduduki oleh warga biasa.

²¹ Janwandri, " Proses Pemilihan Kepala Desa Di Desa Tanjung Nanga Kecamatan Malinau Selatan Kabupaten Malinau", *eJournal Imu Pemerintahan*, Vol. 1 No. 1 (Januari, 2013), 235-247.

Pemilihan kepala desa bertujuan untuk memilih calon kepala desa yang bersaing dalam pemilihan kepala desa untuk dapat memimpin desa. Pemilihan kepala desa dilakukan secara langsung oleh masyarakat desa yang terdaftar dengan memilih langsung calon kepala desa yang dianggap oleh masyarakat mampu membawa aspirasi masyarakat dan pembangunan desanya.

Pilkades dilakukan dengan mencoblos tanda gambar calon kepala desa. Pilkades ada telah jauh sebelum era Pilkada langsung. Akhir-akhir ini ada kecenderungan Pilkades dilakukan secara serentak dalam satu kabupaten, yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah. Hal ini dilakukan agar pelaksanaannya lebih efektif, efisien, dan lebih terkoordinasi dari sisi keamanan. Calon kepala desa yang terpilih kemudian disahkan dan dilantik, adapun masa jabatan kepala desa adalah enam tahun dalam satu periode pemerintahan dan terhitung sejak tanggal pelantikan.

3. Syarat-syarat menjadi Kepala Desa

Dalam perkembangannya pemilihan Kepala Desa juga diataur dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang desa yang dijelaskan dalam pasal 33 bahwasannya persyaratan untuk dapat dicalonkan sebagai kepala desa sebagai berikut:²²

- a. Warga negara Republik Indonesia
- b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

-

²² Undang-Undang Dasar Republik Indonesia No.6 Tahun 2014.

- c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.
- d. Berpendidikan palin rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat.
- e. Berusia paling rendah 25 tahun pada saat mendaftar.
- f. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran.
- g. Tidak sedang menjala<mark>ni</mark> h<mark>uk</mark>uman pidana penjara.
- h. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali lima tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.
- Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- j. Berbadan sehat
- k. Tidak pernah sebagai Kepala Desa selama tiga kali masa jabatan.